

## PENGKAJIAN DUKUNGAN FINANSIAL DAN NONFINANSIAL DALAM PENGEMBANGAN SENTRA BISNIS USAHA KECIL DAN MENENGAH (2003)

Kuantitas usaha kecil dan menengah (UKM) yang besar dengan kondisi beragam dalam berbagai aspek bisnis, membawa implikasi bahwa generalisasi kebijakan dan bantuan perkuatan yang menyeluruh terhadap UKM dalam rangka pengembangan UKM tersebut akan sulit mewujudkan tujuan pengembangan UKM. Di sisi lain, kebijakan atas dasar pendekatan individupun mustahil dilakukan karena berbagai keterbatasan pemerintah pembina UKM. Karena itu, pendekatan program pengembangan UKM melalui sentra merupakan kegiatan-kegiatan yang riil dalam upaya pemenuhan kebutuhan UKM secara menyeluruh dan dilakukan oleh lembaga yang secara komprehensif dapat memahami kebutuhan UKM.

Dalam pengembangan sentra bisnis UKM tersebut, Lembaga Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis/*Business Development Service Provider* (LPB/BDS-P) merupakan lembaga pendukung mitra pemerintah yang berperan menyediakan layanan bisnis, antara lain jasa informasi, konsultasi, pelatihan, pengembangan/advokasi, pemasaran. Aksesibilitas UKM yang berada di sentra bisnis berupa Modal Awal dan Padanan (MAP) yang disalurkan melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga keuangan Mikro (LKM), Inkubator Bisnis, Penjaminan, dan Modal Ventura. Sedangkan dukungan finansial yang diserahkan kepada LPB/BDS-P juga digunakan sebagai modal dalam melaksanakan aktivitasnya.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dukungan finansial dan nonfinansial yang diberikan kepada sentra bisnis UKM, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan sentra bisnis UKM, profil sentra bisnis UKM yang mendapat perkuatan, dan kinerja BDS-P dan KSP/USP sebagai penyalur bantuan perkuatan.

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan sampel UKM yang berada pada sentra bisnis yang memperoleh dukungan finansial berupa dana MAP dan dukungan nonfinansial berupa jasa layanan pengembangan bisnis yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis (LPB/BDS-P). Di samping UKM, objek kajian lainnya adalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang menyalurkan dana MAP dan LPB/BDS-P yang menjadi mitra UKM yang berada pada sentra bisnis UKM.

Untuk mengukur kinerja investasi, akan didasarkan data akuntansi yang bersumber dari laporan keuangan, yaitu neraca dan ikhtisar laba/rugi tahun 2001 dan 2002, sedangkan pengukuran nilai tambah akan disusun melalui suatu survai yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan struktur ongkos produksi atau susunan input primer. Cara yang akan ditempuh dalam penyusunan nilai tambah adalah pendekatan *establishment* di mana LPB/BDS-P, KSP/USP koperasi, dan UKM yang dipilih sebagai unit penelitian merupakan suatu kegiatan usaha yang berada dalam suatu sentra/klaster yang menjadi basis pengukuran nilai tambah.

Pengkajian ini dilaksanakan di seluruh provinsi di wilayah Indonesia yang telah memperoleh dukungan finansial dan nonfinansial dalam pengembangan sentra bisnis UKM. Adapun ruang lingkup kegiatan pengkajian ini adalah: 1) menganalisis penyaluran dan penggunaan dana MAP dalam pengembangan sentra bisnis UKM (mekanisme penyaluran/pengembalian, jumlah UKM penerima dana MAP, jumlah dana MAP, manfaat/dampak MAP terhadap kinerja UKM/sentra bisnis UKM); 2) menganalisis kinerja LPB/BDS-P, KSP/USP/LKM dalam penyaluran MAP untuk pengembangan sentra bisnis UKM (seleksi UKM penerima MAP dan alokasi dana MAP, informasi/penyuluhan); 3) penyaluran dan pengembalian dana MAP, monitoring dan evaluasi, menganalisis kinerja UKM/sentra bisnis UKM.

Hasil kajian menunjukkan sebagian besar LPB/BDS-P (43,33%) berasal dari institusi yayasan, sisanya dari perguruan tinggi (20%), koperasi (15%), dan lainnya (21,6%), dengan status kantor sebagian besar sewa (48,33%), pinjaman (26,6%), dan milik sendiri sebanyak 25%. Pada umumnya lokasi kantor LPB/BDS-P berjarak rata-rata 15,11 km dari sentra.

Ketua LPB/BDS-P umumnya laki-laki (86,67%) dan hanya 13,33% ketuanya perempuan. Pendidikan tertinggi ketua LPB/BDS-P sebagian besar S1 atau lebih (71,19%), SLTA (16,95%) dan diploma (11,86%). Pada tahun 2002 tenaga kerja yang bekerja di LPB/BDS-P rata-rata sebanyak 8 orang yang sebagian besar (74,12%) laki-laki. Sebesar 72,35% dari tenaga kerja yang dimiliki merupakan tenaga ahli seperti pelatih, konsultan, dan pendamping. Rata-rata pendidikan tenaga kerja 68,14% S1 atau lebih, 22,57% tamatan SLTA, 7,74% tamatan diploma dan 1,55% tamatan SLTP. Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahliannya sebanyak 95% LPB/BDS-P masih memerlukan pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan yang paling banyak diminati adalah manajemen pemasaran dan desain produk, selanjutnya manajemen keuangan serta teknologi informasi

Pemanfaatan dana dukungan operasional oleh LPB/BDS-P mencapai 57,24%, 37,51% di antaranya digunakan untuk upah dan gaji, 10,92% untuk pendidikan dan pelatihan, 8,59% perjalanan, 7,5% biaya administrasi, 6,09% pengembangan sentra, 6,13% biaya konsultasi, 5,26% bimbingan/pendampingan, dan 17,93% lain-lain. Dari sejumlah LPB/BDS sampel yang baru diaudit oleh instansi berwenang baru 43,33% LPB/BDS-P, sedangkan sisanya 56,67% belum diaudit.

Dalam hal akses dana MAP, hampir semua LPB/BDS-P (91,67%) menjalankan tugasnya untuk memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan dana MAP kepada UKM penerima MAP.

Tiga perempat LPB/BDS-P bekerjasama dengan KSP/USP penyalur MAP untuk melakukan pemantauan pemanfaatan dana MAP dan monitoring kelancaran pengembalian dana MAP. Sebanyak 58,33% LPB/BDS-P membantu KSP/USP dalam hal manajemen keuangan KSP/USP.

Bidang layanan yang paling banyak diberikan oleh LPB/BDS-P terhadap UKM adalah jasa informasi, jasa konsultan, dan pendampingan usaha. Sedangkan bidang yang paling sedikit diberikan kepada UKM binaan adalah fasilitasi dalam pengembangan teknologi. Lebih dari separuh (65,38%) LPB/BDS-P melakukan pemantauan perkembangan UKM binaan dalam jangka waktu bulanan, sementara 26,92% melakukan pemantauan dalam jangka waktu tri wulanan.

Secara keseluruhan pada tahun 2002, hampir separuh (48,21%) pendapatan LPB/BDS-P berasal dari jasa layanan sedangkan dana dukungan operasional dari Kementerian KUKM memberikan kontribusi sebesar 19,20%. Komponen biaya terbesar LPB/BDS-P digunakan untuk upah dan gaji (24,04%) alat tulis kantor (11,49%), penyusutan 4,87% dengan surplus usaha yang tercipta sebesar 25,05%. Hubungannya dengan penciptaan nilai tambah (*value added*) adalah penciptaan rasio nilai tambah LPB/BDS-P sebesar 57,09%.

Sementara itu, hasil kajian KSP/USP menunjukkan lebih dari separuh (52,38%) koperasi penyalur MAP berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan sisanya (47,62%) berbentuk Unit Simpan Pinjam (USP). Sebagian besar (96,83%) KSP/USP memiliki ketua laki-laki, sedangkan pendidikan tertinggi ketua KSP/USP adalah tamatan S1 yaitu lebih (35,59%), sisanya tamatan SLTA dan SLTP masing-masing sebesar 23,73%. Selain itu, juga masih ditemukan ketua KSP/USP yang tamat/tidak tamat SD (1,69%). Manajer KSP/USP sebagian besar tamatan SLTA (54,55%), sisanya tamatan diploma I/II/III/Akademi

(18,18%), S1/S2/S3 (24,24%), dan yang terendah tamatan SLTP (3,03%). Sementara itu, tenaga kerja KSP/USP sebagian besar tamatan SLTA (52,03%), tamatan SLTP (17,01%), tamat/tidak tamat SD (15,99%), sedangkan tamatan diploma dan S1 atau lebih sekitar 14,97%). KSP/USP memiliki anggota rata-rata sebanyak 271 orang.

Data pada tahun 2002 menunjukkan sebanyak 58,73% USP telah dikelola secara otonom dan sisanya sebanyak 41,27 masih bergabung dengan usaha lain. Banyaknya penyimpan untuk setiap KSP/USP rata-rata sebanyak 315 orang, sedangkan peminjam rata-rata sebanyak 261 orang dengan persentase peminjam yang kreditnya macet sebanyak 7,03%.

Sebanyak 76,38% MAP yang diterima KSP/USP disalurkan kepada anggota UKM, 11,18% anggota bukan UKM, sisanya diinvestasikan di KSP/USP sebanyak 5,91% dan untuk keperluan lainnya 6,53%. Hingga penelitian dilaksanakan, anggota yang telah menerima dana MAP sekitar sepertiganya (36,5%). Pertimbangan utama KSP/USP dalam menentukan anggota yang layak menerima MAP sebagian besar berdasarkan agunan dan proposal dan hanya 5,1% yang berdasarkan atas saran dari LPB/BDS-P. Rata-rata UKM telah membayar angsuran pokok dan bunga, dan masih ada 19,34% UKM yang menunggak.

Program dukungan finansial dalam pengembangan sentra bisnis UKM melalui dana MAP selain memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha UKM, ternyata juga telah memberikan dampak positif bagi kegiatan usaha KSP/USP penyalur dana MAP. Indikasi ini terlihat dari peningkatan volume usaha/omzet KSP/USP per bulan dari rata-rata 25,44 juta rupiah menjadi rata-rata 38,26 juta rupiah setelah KSP/USP menyalurkan MAP. Begitu pula dengan jumlah peminjam dan penyimpan mengalami peningkatan per KSP/USP yaitu dari sebanyak 253 orang menjadi 341 orang.

Hasil penelitian terhadap UKM menunjukkan UKM laki-laki hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan pengusaha perempuan dengan tingkat pendidikan tertinggi terbanyak tamatan SLTA kebawah. Pemilik/pengusaha UKM dengan pendidikan diploma I atau lebih hanya 2,9% dan persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan pemilik/pengusaha UKM yang sarjana (3,6%).

Modal usaha UKM terbesar berasal dari milik sendiri (85,47%), sedangkan kontribusi dari MAP sebesar 8,45%. Rata-rata setiap UKM menerima MAP sebesar 5,01 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian rata-rata selama 18 bulan. Setiap MAP yang diterima oleh UKM dikenakan jasa bunga kredit efektif rate setahun sebesar 33,49% per tahun dan biaya administrasi rata-rata 102,56 ribu rupiah.

Dalam memperoleh dana MAP, sebanyak 36,81% UKM menggunakan agunan dan 62,19% UKM tidak menggunakan agunan. Rata-rata taksiran nilai agunan yang digunakan UKM sebesar 50,14 juta rupiah yang berbentuk antara lain sertifikat tanah dan surat-surat kendaraan. MAP yang diterima UKM terutama (76,75%) digunakan untuk penambahan modal kerja (termasuk pembelian bahan baku dan penolong), 14,45% untuk perbaikan/pembelian barang modal (mesin, kendaraan, dan lainnya), sisanya digunakan untuk pengembangan produk, perluasan pasar, dan lainnya.

Dukungan finansial dalam pengembangan sentra bisnis UKM melalui dana MAP memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha UKM. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan rata-rata volume usaha/omzet UKM perbulan, yaitu dari 12,77 juta rupiah sebelum menerima MAP menjadi 14,87 juta rupiah setelah menerima dana MAP. Demikian juga dengan rata-rata keuntungan UKM perbulan, yaitu naik dari 2,72 juta rupiah menjadi 3,48 juta rupiah, sementara tenaga kerja rata-rata

meningkat dari 5 orang menjadi 6 orang. Jumlah UKM yang mengalami peningkatan volume usaha dan keuntungan setelah dibina LPB/BDS-P masing-masing sebanyak 40,83% dan 39,18%, sedangkan yang tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 53,74% untuk volume usaha dan 60,82% untuk SHU.

Selain dukungan finansial, UKM mendapatkan juga dukungan nonfinansial dari LPB/BDS-P. Berdasarkan hasil survai ternyata hanya sebanyak 60,72% UKM yang merasa dibina oleh LPB/BDS-P dan sisanya (39,28%) mengaku tidak pernah dibina LPB/BDS-P. Bidang layanan yang paling banyak diberikan adalah jasa informasi, fasilitasi dalam memperoleh permodalan, dan jasa konsultasi (teknis dan produksi). Umumnya UKM tidak dikenakan biaya dalam memperoleh pelayanan jasa dari LPB/BDS-P. Di samping mendapatkan jasa layanan, sebanyak 45,62% UKM juga melakukan konsultasi permasalahan kepada LPB/BDS-P. Permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan adalah permodalan (84,75%), pemasaran (62,71%), dan bahan baku 41,24%. Rata-rata lebih dari setengah (60%) permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Sebagian besar UKM menyatakan menerima layanan 1-3 kali dari LPB/BDS-P, dan hanya 12,88% UKM yang menyatakan mendapat layanan dari BDS antara 5 sampai 10 kali. Sementara itu, UKM menilai keberadaan LPB/BDS bermanfaat bagi pengembangan usaha UKM dan hanya 16,49% yang menyatakan kurang bermanfaat. Namun dari sisi pelayanan hanya 31,44% UKM yang menyatakan sudah baik, yang tampaknya ada kaitannya dengan penguasaan materi oleh tenaga ahli. Dalam hal ini, 32,73% UKM menyatakan tenaga ahli LPB/BDS-P dinilai baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya keberadaan LPB/DS-P diperlukan bagi pengembangan bisnis UKM. Untuk itu, perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk memperoleh gambaran substantif dan kualitatif mengenai keandalan BDS dalam pengembangan UKM.

Program dukungan finansial pemerintah merupakan langkah yang paling banyak diminati oleh pengusaha kecil dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja. Program dukungan nonfinansial sampai tingkat tertentu dirasakan cukup bermanfaat, terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan informasi pembiayaan, pemasaran dan bahan baku. Namun, tingkat keandalan dukungan nonfinansial dalam meningkatkan kinerja pengusaha kecil masih dipertanyakan.